

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian SAK EMKM

Pada tanggal 1 Januari 2018 DSAK IAI akan memberlakukan SAK baru khusus untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM diterbitkan untuk membantu EMKM di Indonesia yang saat ini jumlahnya 57 juta serta memberikan Menurut SAK EMKM (2016), SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah. Dalam SAK EMKM mengatakan bahwa entitas mikro kecil dan menengah tanpa adanya akuntabilitas publik yang signifikan, seperti yang ditetapkan didalam SAK EMKM yang memenuhi definisi serta kriteria ekonomi mikro kecil dan menengah sebagaimana yang telah di atur didalam perundang-undangan di Indonesia paling tidak selama dua tahun berturut-turut. Dalam SAK EMKM juga dikatakan bahwa entitas yang tidak memenuhi kriteria serta definisi diizinkan untuk menggunakan SAK EMKM jika otoritas yang terkait mengizinkan. Entitas tanpa kewajiban publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan
- b. Mempublikasikan laporan keuangan tujuan umum untuk pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal termasuk pemilik yang tidak terlibat langsung dalam operasi bisnis, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Suatu entitas memiliki tanggung jawab publik yang signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan, atau sedang dalam proses pengajuan, pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau regulator lain dalam rangka penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. Entitas mengendalikan aset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok besar orang, seperti bank, perusahaan asuransi, pialang dan/atau pialang sekuritas, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Entitas dengan tanggung jawab publik yang signifikan dapat menggunakan SAK EMKM jika otoritas yang berwenang menetapkan peraturan yang mengizinkan penggunaan SAK EMKM. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20, selain yang berkaitan dengan kekayaan bersih, ada dua hal penting yang harus diketahui, yaitu:

- a. Perusahaan independen dan bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi, yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung;
- b. Tidak memiliki atau mengendalikan mitra usahanya.

Kehadiran SAK EMKM ini sangat tepat di era sekarang mengingat pesatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tentu membutuhkan sebuah standar yang baku dalam mencatat transaksi keuangan mereka. Dengan munculnya SAK EMKM ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu segera melakukan penyesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan.

2.1.2 Manfaat dan Tujuan

SAK EMKM ditujukan kepada seluruh bidang usaha agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip keberlanjutan yang menginginkan bisnisnya terus berkembang. Menumbuhkan bisnis membutuhkan banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah meyakinkan masyarakat bahwa upaya yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi, akuntabilitas berlangsung melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar yang ditentukan. Penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan standar membantu manajemen perusahaan mendapatkan berbagai kemudahan seperti: penetapan kebijakan perusahaan di masa mendatang, memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, dll. SAK EMKM (2016) sehingga tidak menyulitkan pengguna usaha kecil dan menengah bisnis. Yaitu, penyuluhan yang diuraikan di atas adalah suatu kesatuan kegiatan yang melakukan kegiatan tetapi yang sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat, atau dengan kata lain unit usaha milik orang perseorangan atau kelompok orang yang kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan ini menyumbang sekitar 80% dari total kegiatan di Indonesia. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan tahunan memerlukan perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan.

2.1.3 Karakteristik SAK EMKM

Standar akuntansi yang berdiri sendiri (tanpa mengacu pada ke SAK)

1. Mayoritas menggunakan konsep biaya historis
2. Hanya mengelola transaksi yang sering dilakukan oleh usaha kecil dan menengah
3. Skema yang lebih sederhana dari SAK Umum

Ada beberapa karakteristik kualitatif dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dimengerti

Kualitas penting dari informasi dalam laporan keuangan adalah mudah dipahami oleh pengguna. Untuk tujuan ini, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang cukup tentang kegiatan ekonomi dan bisnis serta akuntansi dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan hati-hati. Namun, pentingnya membuat laporan keuangan dapat dipahami, tetapi tidak konsisten dengan informasi yang relevan, dapat diabaikan karena informasi tersebut mungkin terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar berguna, informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan pengguna. Informasi memiliki kualitas relevansi jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang atau masa depan dan untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi mereka sebelumnya.

3. Materialitas

Informasi dianggap material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pihak yang dituju berdasarkan laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran item, apakah kesalahan dinilai berdasarkan situasi tertentu dari kelalaian atau ketidaktepatan. Namun, tidak tepat untuk membuat kesalahan atau menyimpang secara tidak signifikan dari SAK EMKM untuk sampai pada representasi tertentu dari posisi permodalan, keuangan, atau laba perusahaan.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan. Informasi memiliki kualitas yang dapat diandalkan jika bebas dari kesalahan dan bias material dan jika secara jujur mewakili apa yang diklaim atau dapat diharapkan secara wajar. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (dalam pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau pedoman untuk mencapai hasil tertentu.

5. Subtansi Mengungguli bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan menurut isi dan realitas ekonominya dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami dari pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan

keadaan tersebut serta penggunaan akal sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian yang baik mencakup unsur kehati-hatian dalam membuat penilaian yang wajar dalam keadaan yang tidak pasti sehingga aset atau pendapatan tidak ditaksir terlalu tinggi dan kewajiban atau biaya tidak diremehkan. Namun, penerapannya, dengan kemampuan terbaik kami, tidak mengizinkan penciptaan aset yang lebih rendah atau pendapatan yang lebih rendah atau pengakuan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, akal sehat tidak memungkinkan adanya prasangka.

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dari segi materialitas dan biaya. Kerahasiaan yang disengaja berarti bahwa informasi tidak benar atau menyesatkan dan oleh karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak cukup relevan.

8. Bisa Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk melihat tren kondisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk menilai kondisi keuangan relatif, kinerja dan perubahan kondisi keuangan. Oleh karena itu, evaluasi dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antara periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Selain itu, pengguna laporan keuangan harus diinformasikan tentang kebijakan akuntansi yang

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, dan dampak dari perubahan tersebut.

9. Tepat waktu

Agar relevan, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya. Ketepatan waktu termasuk menyediakan informasi keuangan dalam periode keputusan. Jika terjadi keterlambatan komunikasi yang tidak semestinya, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu mencapai keseimbangan relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, pertimbangan utama adalah cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna saat membuat keputusan yang menguntungkan.

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat informasi harus lebih besar daripada biaya penyediaannya. Namun, mengevaluasi biaya dan manfaat adalah proses pertimbangan yang substansial. Biaya ini juga tidak harus ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaatnya. Ketika mengevaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa pengguna eksternal juga dapat menikmati manfaat dari informasi tersebut. SAK EMKM (2016).

2.1.4 Pengukuran Unsur – Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses menentukan jumlah uang yang digunakan perusahaan untuk menilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban di neraca.

Proses ini melibatkan pemilihan dasar pengukuran tertentu. Kebijakan akuntansi yang biasa digunakan adalah biaya perolehan dan nilai wajar.

1. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar pembayaran yang dilakukan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Liabilitas diakui sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar aset nonmoneter yang diterima dan bukan liabilitas pada saat liabilitas timbul.
2. Nilai wajar adalah pertimbangan yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak yang berkepentingan dan yang mengetahui dalam suatu transaksi yang wajar.

2.1.5 Penggunaan SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Bagi Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) diperuntukkan bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan
2. Menerbitkan Laporan keuangan untuk tujuan umum financial kepada pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam manajemen, investor, saham, dll.

Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab publik yang penting ketika:

1. Perusahaan telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada regulator pasar modal atau otoritas pengawas lainnya untuk pengeluaran efek di pasar modal atau sedang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran.

2. Perusahaan mengelola aset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok besar individu seperti bank, perusahaan asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi SAK EMKM (2016) Perusahaan dengan tanggung jawab publik yang signifikan dapat menggunakan SAK EMKM jika pejabat yang berwenang menetapkan pemberian izin penggunaan SAK EMKM

2.1.6 Konsep Entitas Bisnis atau Kesatuan Usaha

SAK EMKM (2016), Dalam akuntansi konsep entitas bisnis atau kesatuan usaha menjadi hal yang penting karena bertujuan supaya transaksi perusahaan tidak dicampuradukkan, keuangan perusahaan harus terpisah dari keuangan dari direktur utama, karyawan, atau keuangan pemilik SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan hasil usaha suatu entitas.

DSAK IAI menegaskan bahwa, dalam hal entitas tidak memenuhi asumsi dasar konsep entitas bisnis ini, meskipun telah memenuhi syarat kualitatif dan kuantitatif dalam SAK EMKM, maka entitas tersebut memilih opsi untuk tidak menerapkan SAK EMKM.

2.1.7 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

1. Penyajian laporan keuangan

Penyajian laporan keuangan secara wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lain sesuai dengan definisi dan

kriteria akuntansi untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Informasi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak cukup untuk memahami pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Menurut Rosdiani (2011), kualitas laporan tahunan adalah sejauh mana laporan tahunan yang disajikan adalah benar dan wajar. Laporan keuangan berkualitas tinggi merupakan dasar yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis bagi pihak yang berkepentingan.

2. Kepatuhan terhadap SAK EMKM

Perusahaan yang laporan keuangannya mematuhi dengan SAK EMKM harus menyampaikan pernyataan yang tegas dan lengkap dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan memenuhi SAK EMKM kecuali memenuhi semua persyaratan dalam SAK EMKM

3. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, perusahaan yang menggunakan SAK EMKM membuat penilaian kemampuan perusahaan untuk terus melakukan bisnis. Perusahaan mempunyai kelangsungan usaha kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis. Jika dalam membentuk suatu usaha, manajemen menyadari adanya ketidakpastian terkait peristiwa atau kondisi yang berpotensi menimbulkan keraguan material terhadap kelangsungan operasi perusahaan, maka perusahaan harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika suatu perusahaan tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan

pengajuan bisnis, fakta itu harus diungkapkan, disertai dengan dasar penyusunan laporan dan alasan mengapa perusahaan tidak memiliki bisnis.

4. Frekuensi pelaporan

Entitas harus menyajikan laporan keuangan yang lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya sekali dalam setahun. Ketika akhir periode entitas berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih besar atau kurang dari satu tahun, entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut
- b. Alasan untuk menggunakan untuk periode yang lebih pendek atau lebih lama
- c. Fakta bahwa nilai komparatif dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan laba ditahan, laporan arus kas dan catatan terkait laporan keuangan tidak sepenuhnya sebanding.

5. Presentasi yang konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos neraca antar periode harus konsisten, kecuali:

- a. Telah terjadi perubahan signifikan dalam sifat bisnis entitas atau perubahan penyajian atau klasifikasi dengan tujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai dengan kriteria pemilihan dan penerapan.
- b. SAK EMKM meminta perubahan penyajian.

6. Informasi perbandingan

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali SAK EMKM menyatakan lain (termasuk informasi dalam

laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas harus memasukkan informasi komparatif untuk memperoleh informasi deskriptif dan deskriptif jika relevan dengan pemahaman atas laporan keuangan untuk periode berjalan.

7. Relevansi dan agregasi

Pos-pos yang material disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan pos-pos yang tidak signifikan digabungkan dengan jumlah yang serupa berdasarkan sifat atau fungsinya. Penghilangan pencantuman atau kesalahan penyajian suatu item dianggap relevan jika, secara individual atau kolektif, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Ukuran dan sifat barang-barang ini dapat menjadi faktor penentu.

1. Laporan keuangan lengkap diterapkan dalam laporan SAK EMKM. keuangan lembaga tersebut antara lain:

a. Review situasi keuangan pada akhir periode

Neraca biasa disebut dengan neraca. Menurut Kartikahadi (2012), laporan posisi keuangan adalah daftar yang mewakili keadaan keuangan, yaitu susunan dan jumlah aset, kewajiban dan aset suatu entitas tertentu pada tanggal tertentu. Menurut IAI dalam SAK EMKM (2016), laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Neraca suatu entitas menurut SAK EMKM dapat memuat akun-akun sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| a. Kas dan setara kas | b. Piutang |
| c. Persediaan | d. Aset tetap |

- e. Utang usaha
 - f. Utang bank
- b. Laporan laba rugi selama periode

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya dalam jangka waktu tertentu (Sariati, 2014). Menurut IAI dalam SAK EMKM, suatu entitas dapat menyajikan laporan laba rugi yang mewakili kinerja keuangan entitas selama suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun berikut:

- 1) Pendapatan
 - 2) Beban keuangan
 - 3) Beban pajak
- c. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan tidak memberikan semua informasi yang diperlukan kepada pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan, sehingga perlu adanya catatan keuangan untuk menambahkan informasi yang diperlukan secara deskriptif dan dilaporkan secara naratif, selain dapat menginterpretasikan data yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengguna juga harus menelaah catatan atas laporan keuangan untuk memahami asumsi yang digunakan dalam laporan keuangan komprehensif. Menurut IAI dalam SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis bilamana praktis bagi setiap akun dalam laporan keuangan untuk menampilkan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan yang mengandung konten tambahan:

- 1) Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- 2) Ringkasan kebijakan akuntansi.
- 3) Informasi tambahan dan beberapa detail akun yang menjelaskan transaksi penting dan material untuk membantu pengguna memahami laporan keuangan.

d. Identifikasi laporan keuangan

Entitas harus secara jelas mengidentifikasi setiap komponen laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan tersebut harus dibedakan dari informasi lain yang terkandung dalam laporan tersebut, selain itu, informasi berikut disajikan dan diulangi, jika perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- 1) Nama perusahaan pelapor dan perubahan nama tersebut sejak periode pelaporan terakhir
- 2) Tanggal atau periode yang tercakup dalam laporan keuangan, mana yang paling tepat untuk setiap komponen laporan keuangan;
- 3) Mata uang pelaporan;
- 4) Bulatkan angka-angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2.1.8 Kas Basis dan Akrua Basis

SAK EMKM (2016), Basis akuntansi adalah prinsip akuntansi yang mengacu pada saat transaksi diukur. Dalam akuntansi, ada 2 basis yang sering

digunakan untuk mencatat terjadinya suatu transaksi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah metode akuntansi yang mengakui transaksi ketika kas atau bintang kas diterima dan dikeluarkan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas itu di terima atau di dikeluarkan. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan metode cash basis umumnya terdiri dari kas dan ekuitas pemilik, sedangkan laporan keuangan yang dihasilkan dengan metode akrual mengakui adanya kredit dan utang (Rahayu, 2015).

SAK EMKM menyebutkan bahwa salah satu asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah persaingan waktu. DSAK IAI telah memutuskan untuk menjaga asumsi yang mendasari konsisten dengan asumsi yang mendasari yang digunakan dalam SAK lainnya Laporan keuangan yang disusun dengan dasar akrual akan menghasilkan informasi yang lebih merepresentasikan dengan tepat kondisi dan aktivitas bisnis entitas selama dan padaakhir darisatu priode pelaporan.sehingga membantu pengguna laporan keuangan.

2.1.9 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan utama yang mendukung pembangunan ekonomi. Pergerakan sektor UKM sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut permintaan pasar. Riyanto (2011).

UU No. 20 Tahun 2008 dalam buku karya Oskar Raja (2010) tentang usaha mikro, kecil dan menengah, terdapat beberapa definisi yang dapat mengklasifikasikan suatu entitas dalam jenis usaha kecil atau menengah, yaitu:

- a. Sebuah. Usaha Mikro adalah kegiatan manufaktur yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Perusahaan Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang mandiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan cabang atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau yang langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria . bagi Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- c. Perusahaan Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang dikembangkan sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang tidak dikuasai atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau yang langsung atau tidak langsung menjadi bagian dari perusahaan kecil atau besar dengan total aset atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu, UMKM juga memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau mempunyai peredaran tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Definisi UMKM adalah tidak adanya pembagian fungsi yang jelas antara bidang administrasi dan operasional. Sebagian besar industri kecil dijalankan oleh orang-orang yang juga bertindak sebagai pemilik dan pengelola bisnis dan menggunakan pekerjaan keluarga dan kerabat dekat mereka. Kedua, terbatasnya akses usaha kecil ke lembaga perkreditan formal, sehingga mereka cenderung bergantung pada pengeluaran usaha dari modal sendiri atau sumber lain seperti anggota keluarga, kerabat, pedagang perantara dan bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan tidak memiliki kepribadian hukum.

Berkaitan dengan pernyataan definisi UMKM di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan yang sama mengenai UMKM. Pertama, dari segi kekayaan, UMKM cenderung merupakan entitas yang memiliki kekayaan bersih tidak kurang dari Rp. 10 miliar. Kedua, UMKM adalah unit usaha yang permodalannya lebih mengandalkan struktur private equity atau pada tingkat yang lebih maju telah beralih ke bantuan pinjaman usaha kecil. Keempat, kelompok industri UKM masih terbatas pada kelompok usaha yang cenderung sederhana.

2.1.10 Kendala UMKM

Secara umum, UMKM sendiri menghadapi dua masalah utama, yaitu masalah keuangan dan masalah non-keuangan (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah keuangan antara lain kesulitan dalam mengakses kredit atau permodalan. Tidak ada pendekatan sistematis untuk pembiayaan UMKM.

1. Biaya transaksi yang tinggi, disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit dan memakan waktu, sedangkan jumlah kredit yang disalurkan sedikit.
2. Kurangnya akses terhadap sumber pembiayaan formal, baik karena tidak adanya bank di daerah terpencil maupun kurangnya ketersediaan informasi yang memadai.
3. Bunga kredit untuk investasi dan modal kerja cukup tinggi.
4. Banyak UMKM yang tidak cukup baik karena pengelolaan keuangan yang kurang transparan dan kurangnya keterampilan keuangan dan manajerial.

Sementara itu, masalah organisasi manajemen (non-keuangan) meliputi:

1. Kurangnya pengetahuan tentang teknologi manufaktur dan kontrol kualitas yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kurangnya pendidikan dan pelatihan.
2. Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran, disebabkan oleh minimnya informasi yang dapat diperoleh UKM di pasar, serta terbatasnya kapasitas UKM untuk menawarkan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal kekurangan sumber daya untuk mengembangkan sumber daya manusia.
4. Kurangnya pemahaman tentang keuangan dan akuntansi.

2.1.11 Laporan Keuangan UMKM

Elemen laporan keuangan UMKM yaitu:

a. Neraca

Neraca menyajikan asset, kewajiban dan ekuitas entitas pada suatu saat tertentu.

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode.

c. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi

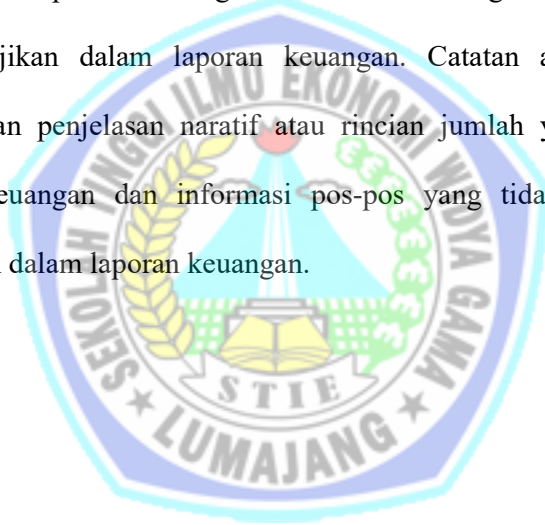
oleh, dan deviden dan distribusi lain kepemilik ekuitas selama periode tersebut.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

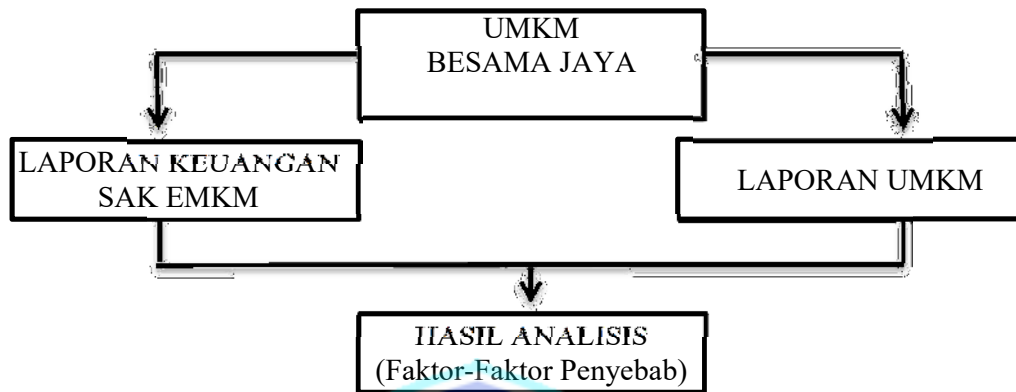
e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan laporan keuangan berisi masi sebaga I tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.



2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka Pikir dalam Penelitian ini yaitu :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Penjelasan mengenai model kerangka pemikiran penelitian diatas ialah hal mendasar peneliti meneliti tentang UMKM Bersama Jaya di Kabupaten Lumajang dilakukan survei lapangan. Selanjutnya penulis mengevaluasi laporan keuangan SAK EMKM dan laporan UMKM lalu dianalisis apa saja yang menjadi faktor-faktor kendala serta apa saja penyebabnya.